

2026

KECAMATAN
KIARAONDONG



TRUST KIARAONDONG

(Total Respect and Unity Super Team for Better Kiaracondong)

RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH (RKPD) KECAMATAN
KIARAONDONG

Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima di Kecamatan Kiaracondong



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah yang terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kiaracondong setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 – 2029 dan Renstra Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Kiaracondong yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Kiaracondong dalam penyusunannya dilakukan melalui 4(empat) pendekatan yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan Partisipatif dan Bottom - Up, (3) Pendekatan Top – Down, dan (4) Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan daerah.

RKPD Kecamatan Kiaracondong tahun 2026 merupakan rencana tahunan, dimana dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong tahun 2025 – 2029 mulai masuk tahun pertama atau tahun pertama dari periode RPJMD 2025 - 2029. Oleh karena itu, salah satu untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode maka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari periode berikutnya.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2026.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Lapang Radar Jalan Babakansari III

Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kiaracondong khususnya dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Camat Kiaracondong





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR DIAGRAM	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	7
1.3	Maksud dan Tujuan	10
1.4	Sistematika Penulisan	11
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2024	12
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024 serta Capaian Renstra Kecamatan Kiaracondong	12
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kiaracondong	82
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	84
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	95
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	101
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	101
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	108
3.3	Program dan Kegiatan	113
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	118
BAB V	PENUTUP	130



DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	20
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	28
2.3	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	85
2.4	Usulan Program Prioritas Musrenbang Tahun 2025 untuk RKPD Tahun 2026 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	97
3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 - 2029	111
4.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Tahun 2026	119
4.2	Rumusan Rencana Program dan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	121

DAFTAR GRAFIK

2.1	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024 dan Tahun 2023	31
2.2	Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024 dan 2023	46
2.3	Capaian Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024	57
2.4	Capaian Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan Tahun 2024 ...	70



DAFTAR GAMBAR

1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD 2

DAFTAR DIAGRAM

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 30





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Selain hal tersebut, RKPD juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

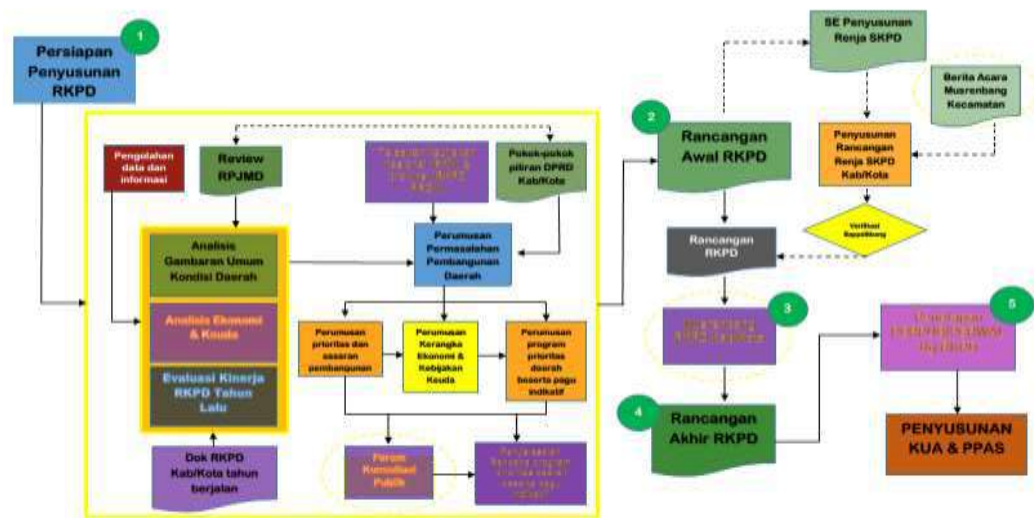
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2025-2029. RKPD Kecamatan Kiaracondong disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan

musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD, dengan siklus yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



Secara garis besar tahapan dan tata cara penyusunan RKPD sebagaimana tergambar dalam gambar 1.1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Persiapan penyusunan RKPD**
 Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.



2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu :

- a. Tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup :
 - 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- b. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) Kota Bandung berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- c. Rancangan awal RKPD dibahas dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bapperida dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Penyusunan rancangan RKPD





Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:

- a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan
 - b. Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
- b. Menyepakati prioritas pembangunan daerah;
- c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi;
- d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perwal tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD

Rancangan Perwal tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bapperida kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang RKPD dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.





Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama *pendekatan teknokratis*, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua *pendekatan partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga *pendekatan politis*, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat *pendekatan bawah-atas (bottom-up)* dan *atas-bawah (top-down)* dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, *pendekatan holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, *pendekatan integratif*, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, *pendekatan spasial*, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2026 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun pertama dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 – 2029. Berkenaan dengan hal tersebut, RKPD Kota Bandung Tahun 2026 harus menjadi pondasi yang kokoh untuk merealisasikan target kinerja serta janji wali kota/wakil wali kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 – 2029.

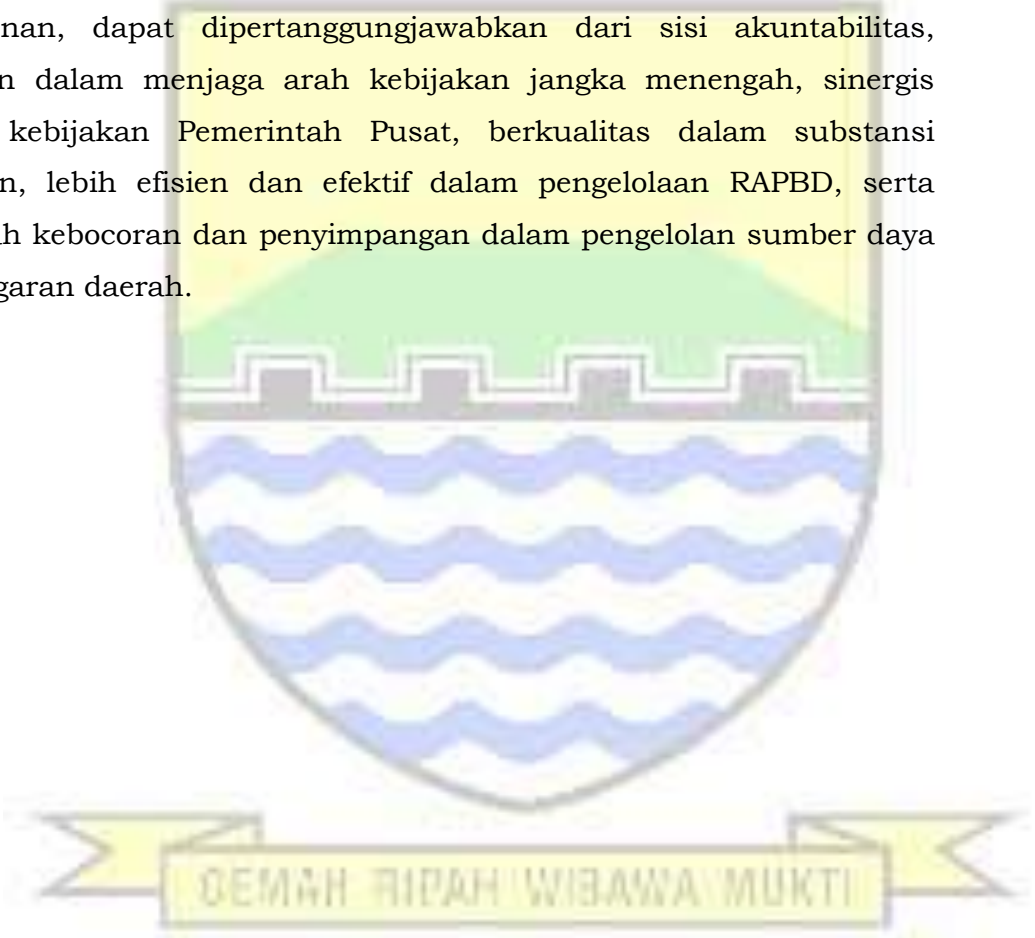
Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sejumlah perbaikan sebagai hasil evaluasi





penerapan aplikasi tersebut telah dilakukan sehingga diharapkan instrumen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, RKPD Kota Bandung Tahun 2026 menjadi lebih transparan dalam proses penyusunan, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam substansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan RAPBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.





1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Kecamatan Kiaracondong dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Renja KPD Kota Bandung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-undang Nomor 104 Tahun 2024 Tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi



- Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8);
 18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 69); dan
 19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 28).



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2026 adalah :

1. Membuat dokumen rencana kerja pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung selama kurun waktu satu tahun 2026 yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 - 2029 dan Renstra Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah.
2. Mendokumentasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2026 adalah :

1. Menyediakan pedoman/acuan pelaksanaan program dan bagi seluruh Perangkat Daerah khususnya di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
2. Menyediakan pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2026.
3. Sebagai bahan pengendalian, evaluasi , dan pengukuran tingkat kinerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD khususnya di Kecamatan Kiaracondong Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V Penutup





BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024 serta Capaian Renstra Kecamatan Kiaracondong

Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kiaracondong Nomor : PN.03.03/Kep.25 - Kec. Kc/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 - 2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimuat program dan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran adalah sebagai berikut :





Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan
	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
	4. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2024 dan Tahun 2025 :

**Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,50
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	%	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelurahan Berdaya	%	100,00
4	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	%	100,00



Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

Capaian kinerja keuangan tahun 2024 pelaksanaan program dan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPPA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan Belanja Operasi adalah sebesar Rp.37.842.967.740,- sedangkan realisasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp.34.576.697.158,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,37 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sasaran 1	21.513.732.759	18.985.409.159	88,25
2	Sasaran 2	7.607.702.380	7.376.470.291	96,96
3	Sasaran 3	6.311.684.836	5.876.554.613	93,11
4	Sasaran 4	2.409.847.765	2.338.263.095	97,03
	Jumlah	37. 842.967.740	34.576.697.158	91,37

Adapun rincian program, pagu anggaran dan realisasi anggaran serta output terkait dengan pencapaian target kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :



**PROGRAM, PAGU ANGGARAN, REALISASI SERTA OUTCOME/OUTPUT
 KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2024**

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	OUTCOME / OUTPUT	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	21.513.732.759	18.985.409.159	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik	88,25
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	135.449.358	132.598.550	<i>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	97,90
	1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.449.358	132.598.550	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	97,90
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.325.867.776	9.436.227.817	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	91,38
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.325.867.776	9.436.227.817	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91,38
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	108.481.220	103.907.100	<i>Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	95,78
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	108.481.220	103.907.100	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	95,78
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.295.076.221	1.038.243.990	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	80,17
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60.468.886	32.972.710	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	54,53
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.492.833	241.780.880	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80,19
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.813.417	66.156.815	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70,52



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Lapang Radar Jalan Babakansari III

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	OUTCOME / OUTPUT	%
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	592.281.340	524.819.408	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	88,61
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.288.988	50.003.350	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	56,64
	6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.762.647	10.300.000	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	39,98
	7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.968.110	112.210.827	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84,39
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>5.402.467.073</i>	<i>4.531.649.829</i>	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>83,88</i>
	1. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.532.429	126.830.000	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	84,82
	2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	618.715.535	556.705.020	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	89,98
	3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	964.663.109	876.274.200	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90,84
	4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.669.556.000	2.971.840.609	Jumlah unit pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya terealisasi	80,99
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>2.180.683.805</i>	<i>2.097.190.153</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>96,17</i>
	1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.691.520	191.663.803	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75,55
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.926.992.285	1.905.526.350	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	98,89
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>2.065.707.306</i>	<i>1.645.591.720</i>	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>79,66</i>





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Lapang Radar Jalan Babakansari III

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	OUTCOME / OUTPUT	%
	1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	863.732.500	483.593.670	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55,99
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.334.634	61.415.200	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74,59
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.119.640.172	1.100.582.850	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	98,30
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.607.702.380	7.376.470.291	Persentase Kelurahan Unggul	96,96
	<i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>3.280.130.300</i>	<i>3.271.712.000</i>	<i>Persentase Laporan RT/RW tepat waktu</i>	<i>99,74</i>
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.280.130.300	3.271.712.000	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99,74
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>230.184.423</i>	<i>209.983.600</i>	<i>Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP</i>	<i>91,22</i>
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	230.184.423	209.983.600	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91,22
	<i>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>3.201.877.732</i>	<i>3.116.068.005</i>	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik terpelihara</i>	<i>97,32</i>
	1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.201.877.732	3.116.068.005	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	97,32
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>895.509.925</i>	<i>778.706.686</i>	<i>Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial</i>	<i>86,96</i>





NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	OUTCOME / OUTPUT	%
	1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	895.509.925	778.706.686	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	86,96
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.311.684.836	5.876.554.613	Persentase Kelurahan Berdaya	93,11
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>5.744.035.805</i>	<i>5.432.252.613</i>	<i>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang Terbina</i>	<i>94,57</i>
	1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.472.422.133	3.334.851.897	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	96,04
	2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.271.613.672	2.097.400.716	18 Pokmas/ Ormas	92,33
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>567.649.031</i>	<i>444.302.000</i>	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina</i>	<i>78,27</i>
	1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	459.782.982	354.169.500	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	77,03
	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	107.866.049	90.132.500	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	83,56
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.409.847.765	2.338.263.095	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan lingkup Kecamatan	97,03
	<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>2.409.847.765</i>	<i>2.338.263.095</i>	<i>Persentase Satlinmas Kelurahan yang terbina</i> <i>Persentase Satkamling RW yang terbina</i>	<i>97,03</i>
	1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.409.847.765	2.338.263.095	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	97,03
	JUMLAH	37.842.967.740	34.576.697.158		91,37



Sumber : Data per 31 Desember 2024 setelah rekonsiliasi

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan RKPD tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 serta realisasi capaian kinerja misi/isu-isu Rencana Perangkat Daerah (RPD), untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik	90 %	90 %	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	100	A	A	100
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100
7.01.01.2.01.00.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	33,33
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100
7.01.01.2.02.00.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 orang/bulan	44 orang/bulan	45 orang/bulan	44 orang/bulan	97,78	45 orang/bulan	44 orang/bulan	24,44
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	33,33
7.01.01.2.05.00.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	33,33





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100
7.01.01.2.06.00.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	0 paket	2 paket	33,33
7.01.01.2.06.00.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	33,33
7.01.01.2.06.00.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	0 paket	2 paket	33,33
7.01.01.2.06.00.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100	4 paket	4 paket	33,33
7.01.01.2.06.00.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100	0 paket	4 paket	33,33
7.01.01.2.06.00.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	33,33
7.01.01.2.06.00.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	33,33
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.07.00.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	-	0 unit	0 unit	-
7.01.01.2.07.00.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	2 unit	4 unit	-
7.01.01.2.07.00.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	657 unit	306 unit	312 unit	306 unit	98,07	0 unit	306 unit	46,57
7.01.01.2.07.00.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	474 unit	95 unit	98 unit	95 unit	96,94	0 unit	95 unit	20,04
7.01.01.2.07.00.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	-
7.01.01.2.07.00.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	-	0 unit	0 unit	-
7.01.01.2.07.00.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	-	0 unit	0 unit	-
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.08.00.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	33,33
7.01.01.2.08.00.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	33,33
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100
7.01.01.2.09.00.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100	59 unit	40 unit	33,33
7.01.01.2.09.00.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	201 unit	88 unit	111 unit	88 unit	79,28	166 unit	88 unit	43,78
7.01.01.2.09.00.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	21 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	5 unit	6 unit	28,57
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7.01.02.2.01.00.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	33,33
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7.01.02.2.02.00.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	33,33
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik terpelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7.01.02.2.03.00.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	33,33





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	33,33
7.01.02.2.04.00.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	33,33
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan Berdaya	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang Terbina	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7.01.03.2.02.00.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah laporan Kegiatan Musrembang di Kecamatan/ Kelurahan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	-	1 laporan	0 laporan	-
7.01.03.2.02.00.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	54 unit/kegiatan	62 unit/kegiatan	62 unit/kegiatan	62 unit/kegiatan	100	27 unit/kegiatan	62 unit/kegiatan	114,81
7.01.03.2.02.00.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54 pokmas/ormas	18 pokmas/ormas	18 pokmas/ormas	18 pokmas/ormas	100	18 pokmas/ormas	18 pokmas/ormas	33,33





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7.01.03.2.03.00.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	100	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	33,33
7.01.03.2.03.00.04	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	33,33
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan lingkup Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
		Persentase Satkamling RW Aktif (Kelurahan)	85,88 %	76,47%	76,47%	76,47%	100	80,00 %	76,47%	89,04
7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Satlinmas Kelurahan yang terbina	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
		Persentase Satkamling RW yang terbina	85,88 %	76,47%	76,47%	76,47%	100	80,00 %	76,47%	89,04
7.01.04.2.02.00.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	33,33





2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pengukuran Kinerja 2024

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Nomor : PN.04.04/Kep.06-Kec.Kc/I/2024 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2024 dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2026 yang mencakup telaahan terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, maka RPD Kota Bandung Tahun 2024 – 2026 memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi/isu-isu strategis Kota Bandung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong
 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -			Realisasi Capaian Tahun Ke -			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	- UU 25 2009 tentang pelayanan publik - Permenpan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		85,50 Nilai	85,75 Nilai	86,00 Nilai	85,73 Nilai	85,83 Nilai	-	1,27	1,09	-
2	Persentase Kelurahan Unggul	-		100 %	100 %	100 %	100%	-	-	1,00	-	-
3	Persentase Kelurahan Berdaya	-		100 %	100 %	100 %	100%	-	-	1,00	-	-
4	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	-		100 %	100 %	100 %	100%	-	-	1,00	-	-





**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	85,50	85,73	100,27
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	100	100	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelurahan Berdaya	100	100	100,00
4	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	100	100	100,00

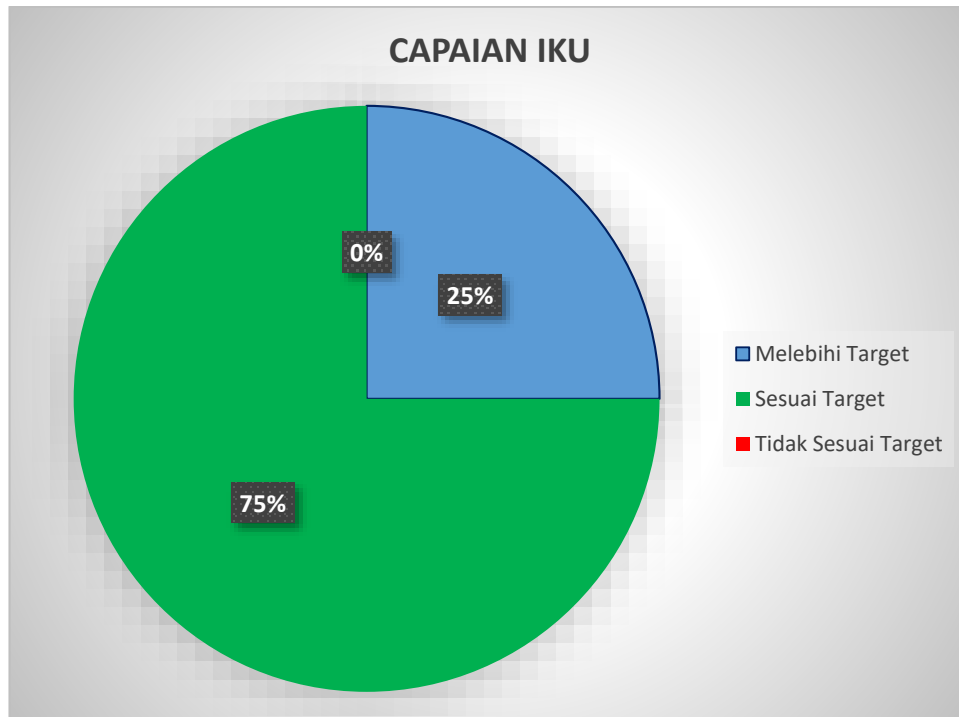
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dengan capaian kinerja 100,27 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100,00 % ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul, Persentase Kelurahan Berdaya dan indikator kinerja Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan dengan capaian kinerja 100,00 %.

Diagram 2.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024**



Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dengan capaian kinerja 100,27 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul, Persentase Kelurahan Berdaya, dan Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan dengan capaian kinerja 100,00 %.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi/Isu-isu Strategis, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2024-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,25	85,52	100,32	85,50	85,73	100,27

Grafik 2.1

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024 dan Tahun 2023



Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong**" adalah sebesar 85,73





dari target sebesar 85,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,27 %, capaian kinerja ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan. Meskipun telah melampaui target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Kecamatan terhadap target Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Capaian Tahun 2026 (akhir Renstra)	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	%
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,25	85,52	100,32	85,50	85,73	100,27	86,00	99,68

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 Renstra atau tahun pertama Renstra, capaian kinerja indikator "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong" tahun ini adalah sebesar 100,27 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2026 maka capaian kinerjanya baru mencapai 99,68 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja diantaranya kegiatan anggaran penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mendukung tercapainya indikator nilai indeks kepuasan masyarakat lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus





pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi/isu ke-2 Kota Bandung yaitu “*Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital (SPBE)*” adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong adalah rata-rata nilai IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. Kinerja nyata dengan Rencana :

Hasil kinerja nyata indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024 adalah sebesar 85,73 dari target sebesar 85,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 0,23 point yaitu 100,27% atau melebihi/melampaui target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

Nilai Unsur-unsur Pelayanan Gabungan sebagai berikut :





No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3,41
2	Sistem,Mekanisme,dan Prosedur (U2)	3,34
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3,25
4	Biaya/Tarif (U4)	3,98
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3,34
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3,36
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3,37
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8)	3,43
9	Sarana dan Prasarana (U9)	3,39
10	Nilai Unsur Tertinggi	3,98
11	Nilai Unsur Terendah	3,25

Sumber : Kecamatan Kiaracondong jumlah Responden sebanyak : 671 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = \mathbf{3.4292}$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKM setelah dikonversi = **85,73**
- Mutu Pelayanan = **B**
- Kinerja unit pelayanan adalah **Baik**



Dari data diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada produk spesifikasi waktu penyelesaian (U3) karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan, sedangkan posisi nilai tertinggi yang harus tetap dipertahankan adalah Biaya/Tarif (U4).

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Ongkos dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak lagi dikenakan atau dipungut biaya pengurusan sehingga masyarakat dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan dari segi biaya.
2. Sudah menurunnya pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah sebagai berikut :

1. Masyarakat berpendapat bahwa waktu penyelesaian layanan yang diterima belum sesuai dengan harapan seperti pelayanan pembuatan surat keterangan ahli waris memakan banyak waktu dan harus bolak-balik, waktu penyelesaian KTP masih dirasakan lambat oleh masyarakat dikarenakan keterbatasan blanko.

Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan :

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap layanan yang ada di kewilayahan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang ada agar lebih meningkat kinerjanya.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada guna meningkatkan hasil kinerja pelayanan.

Upaya untuk meningkatkan unsur pelayanan :

1. Kecamatan serta Kelurahan yang ada di lingkup Kecamatan Kiaracondong berupaya untuk melakukan inovasi produk hasil





layanan diberikan pada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kecamatan dan Kelurahan agar berupaya untuk meningkatkan registrasi secara online.
3. Kecamatan dan Kelurahan agar memfasilitasi kenyamanan ruang tunggu pelayanan secara optimal dan penambahan loket layanan.

Meskipun telah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya meningkatkan kompetensi petugas layanan sebagai garda terdepan terhadap produk layanan yang diberikan Kecamatan dan Kelurahan sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada Tahun tahun 2024 adalah sebesar 85,73 bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2023 sebesar 85,52 maka mengalami peningkatan sebesar 0,21 point atau capaian mengalami peningkatan sebesar 0,24 % terhadap realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2023. Capaian kinerja nyata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Peningkatan capaian kinerja nyata pada indikator kinerja utama tahun sebelumnya dapat dilihat dari beberapa unsur (NRR) yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain :

- Unsur (U1) naik 0,01 point
- Unsur (U5) naik 0,05 point
- Unsur (U7) naik 0,05 point, dan
- Unsur (U9) naik 0,10 point.



Disamping itu terdapat capaian kinerja nyata indikator kinerja utama dengan beberapa indikator unsur pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang mengalami penurunan. Hal dapat dilihat dari beberapa unsur (NRR) yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain:

- Unsur (U2) turun 0,02 point
- Unsur (U3) turun 0,13 point
- Unsur (U4) turun 0,01 point, dan
- Unsur (U6) turun 0,02 point.

Terhadap nilai unsur pelayanan yang rendah perlu ditindaklanjuti dan menjadi skala prioritas perbaikan, dengan melakukan inovasi layanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2024 adalah sebesar 85,73 bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangla menengah (akhir Renstra) tahun 2026 sebesar 86,00 baru mencapai 99,68%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar ditingkatkan kembali kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan perlu dilakukan perbaikan unsur layanan secara terus menerus dan konsisten terhadap pelayanan yang harus diberikan Kecamatan dan Kelurahan kepada masyarakat dan serta perlu ditingkatkan secara maksimal sehingga capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya





Bila capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2024 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		NILAI IKM KECAMATAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	86,36	86,37	100,01
2	ANTAPANI	87,00	90,85	104,43
3	ARCAMANIK	86,00	86,76	100,88
4	ASTANAANYAR	87,00	87,52	100,60
5	BABAKAN CIPARAY	87,32	87,44	100,14
6	BATUNUNGGAL	86,00	87,06	101,23
7	BANDUNG KIDUL	88,00	91,95	104,48
8	BANDUNG KULON	86,80	86,88	100,09
9	BANDUNG WETAN	83,75	87,53	104,51
10	BUAH BATU	85,25	85,80	100,65
11	BOJONGLOA KALER	85,00	85,30	100,35
12	BOJONGLOA KIDUL	86,50	86,88	100,44
13	CIBEUNYING KALER	86,90	86,96	100,07
14	CIBEUNYING KIDUL	85,78	98,46	115,06
15	CIBIRU	86,00	86,53	100,62
16	CICENDO	88,00	88,30	100,34
17	CIDADAP	86,90	87,20	100,35
18	CINAMBO	86,40	88,43	102,35
19	COBLONG	87,27	97,42	111,63
20	GEDE BAGE	87,50	87,50	100,00
21	KIARACONDONG	85,50	85,73	100,27
22	LENGKONG	86,00	86,05	100,06
23	RANCASARI	86,50	91,70	106,01
24	REGOL	84,30	84,97	100,79
25	MANDALAJATI	86,95	86,95	100,00
26	SUKASARI	87,00	88,62	101,86
27	SUKAJADI	86,50	86,56	100,07
28	SUMUR BANDUNG	86,00	86,81	100,94
29	UJUNG BERUNG	85,25	85,94	100,81
30	PANYILEUKAN	86,40	87,28	101,02

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 1 Kecamatan Kiaracondong yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2024 sebesar 85,73 dari target 85,50 dengan capaian kinerja sebesar 100,27% tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Andir, Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Cibeunying Kaler, Gedebage, Lengkong, Mandalajati, dan Sukajadi



dengan capaian kinerjanya sebesar 100,27%, maka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 1 yaitu terdiri atas program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100,27 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1 yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 85,50. Realisasi (*inputs*) 85,73 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{85,73}{85,50} \times 100\% = 100,27\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00} \times 100\% = 111\%$
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	$\frac{A}{A} \times 100\% = 100\%$
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00} \times 100\% = 111\%$



Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 lap	1 lap	$\frac{1 \text{ lap}}{1 \text{ lap}} \times 100 \% = 100 \%$
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00} \times 100 \% = 111 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang / bulan	44 orang / bulan	$\frac{44 \text{ o/b}}{45 \text{ o/b}} \times 100 \% = 98 \%$
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	$\frac{1 \text{ pkt}}{1 \text{ pkt}} \times 100 \% = 100 \%$
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00} \times 100 \% = 111 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	$\frac{2 \text{ pkt}}{2 \text{ pkt}} \times 100 \% = 100 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	$\frac{2 \text{ pkt}}{2 \text{ pkt}} \times 100 \% = 100 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	$\frac{2 \text{ pkt}}{2 \text{ pkt}} \times 100 \% = 100 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	$\frac{4 \text{ pkt}}{4 \text{ pkt}} \times 100 \% = 100 \%$



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Lapang Radar Jalan Babakansari III

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	$\frac{4 \text{ pkt}}{4 \text{ pkt}} \times 100 \% = 100 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 dokumen	4 dokumen	$\frac{4 \text{ dok}}{4 \text{ dok}} \times 100 \% = 100 \%$
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	$\frac{1 \text{ lap}}{1 \text{ lap}} \times 100 \% = 100 \%$
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00} \times 100 \% = 111 \%$
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	4 unit	$\frac{4 \text{ unt}}{4 \text{ unt}} \times 100 \% = 100 \%$
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	312 unit	306 unit	$\frac{306 \text{ unt}}{312 \text{ unt}} \times 100 \% = 98 \%$
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	98 unit	96 unit	$\frac{96 \text{ unt}}{98 \text{ unt}} \times 100 \% = 98 \%$
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya terealisasi	1 unit	1 unit	$\frac{1 \text{ unt}}{1 \text{ unt}} \times 100 \% = 100 \%$
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00} \times 100 \% = 111 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	12 laporan	$\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100 \%$





Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	$\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100 \%$
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00} \times 100 \% = 111 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	40 unit	$\frac{40 \text{ unt}}{40 \text{ unt}} \times 100 \% = 100 \%$
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 unit	88 unit	$\frac{88 \text{ unt}}{111 \text{ unt}} \times 100 \% = 79 \%$
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	6 unit	$\frac{6 \text{ unt}}{6 \text{ unt}} \times 100 \% = 100 \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.18.985.409.159,- atau 88,25 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.513.732.759,-.

Efisiensi dan efektifitas anggaran sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :



No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
A.	Sasaran 1						
1	Melebihi/ Melampaui Target	1	100,27	18.985.409.159	88,25	11,75	113,62
2	Sesuai Target	-					
3	Tidak Mencapai Target	-					

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan sangat baik, dengan pencapaian tingkat efisiensi sebesar 11,75 % dan tingkat efektifitas sebesar 113,62 %.

Dengan nilai sasaran target yang sudah kami tentukan ada beberapa kendala yang kami alami untuk mendapatkan nilai yang objektif di antaranya :

1. Tidak semua warga masyarakat penerima pelayanan, memahami pentingnya pelaksanaan IKM, sehingga tidak jarang masyarakat penerima pelayanan tidak bersedia untuk mengisi kuisisioner yang kami berikan.
2. Masyarakat yang mengisi kuisisioner yang kami berikan sering kali tidak mengisinya dengan objektif sesuai dengan apa yang dirasakan dari pelayanan yang diterima.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan maka perlu menindak



lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana aksi serta anggaran untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan.

2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.

Faktor pendukung Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA dan DPPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kecamatan dan Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum optimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.

Solusi Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan :





Untuk meningkatkan sasaran 1 dengan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang terkait.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.





Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	100,00

Grafik 2.2

Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024 dan 2023



Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator **Persentase Kelurahan Unggul** adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian kinerja ini sesuai target yang



diperjanjikan. Meskipun telah sesuai dengan target yang dicapai, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
terhadap target Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Capaian Tahun 2026 (akhir Renstra)	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra atau tahun pertama Renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong maka capaian kerjanya mencapai 100 %.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi/isu ke-2 Kota Bandung yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital (SPBE)" adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan



Pemerintahan Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul adalah terdapat 4 (empat) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria Kelurahan Unggul, dinyatakan bahwa Kelurahan Unggul tercapai jika memenuhi semua kriteria.

Adapun kriteria capaian Kelurahan Unggul adalah :

1. Laporan RT dan RW lengkap (Kasi Pem) Berdasarkan Perwal 215 Tahun 2018 Terdapat 6 (enam) Dokumen yang harus dipenuhi :

- A.1 s/d A.5 : Laporan Kependudukan
- Data Laporan Keuangan RW (Pengeluaran dan Penerimaan).
Sebagai bentuk administrasi pelaksanaan kegiatan Rt dan RW (honorarium kegiatan RT dan RW)

2. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)

Kriteria:

- a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan;
- b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan;
- c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan;
- d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas;
- e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering;
- f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau.

3. Pemetaan DTKS (Kesos)

4. Fasilitasi pengembangan UMKM – mempunyai NIB (Kasi Ekbang).





3. Kinerja nyata dengan Rencana Perjanjian Kinerja

Realisasi capaian indikator kinerja **Persentase Kelurahan Unggul** tahun 2024 sebesar 100,00 % atau 100,00 % dari target 100,00 % yang diperjanjikan. Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2024 sebesar 100,00 %, merupakan persentase jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi jumlah Kelurahan dengan rincian kriteria sebagai berikut : Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sebanyak 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya, Kelurahan Kebon Kangkung, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Cicaheum dan Kelurahan Kebon Jayanti dari 6 Kelurahan se-Kecamatan Kiaracondong, sehingga pencapaian telah 100,00 %.

Kriteria Persentase Kelurahan Unggul sebagai berikut :

Jenis / Kondisi	Wilayah					
	Sukapura	Kebon Jayanti	Babakan Surabaya	Cicaheum	Babakansari	Kebon Kangkung
Laporan RT dan RW lengkap Berdasarkan Perwal 215 Tahun 2018 Terdapat 6 (enam) Dokumen yang harus dipenuhi : - A.1 s/d A.5 : Laporan Kependudukan - Data Laporan Keuangan RW (Pengeluaran dan Penerimaan). <i>Sebagai bentuk administrasi pelaksanaan kegiatan Rt dan RW (honorarium kegiatan RT dan RW)</i>	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %
Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara : Kriteria - Kerb terpelihara tidak ada	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %



<p>rumpun pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan; - Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan; - Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas; - Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering; - Melakukan penyiraman pada musim kemarau. 						
<p>Pemetaan DTKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan data DTKS setiap triwulan 	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %
<p>Fasilitasi pengembangan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - mempunyai NIB 	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %
<p>Jumlah jenis/kondisi yang memenuhi kriteria</p>	4 jenis kondisi	4 jenis kondisi	4 jenis kondisi	4 jenis kondisi	4 jenis kondisi	4 jenis kondisi
<p>Kriteria Kelurahan</p>	Kelurahan Unggul	Kelurahan Unggul	Kelurahan Unggul	Kelurahan Unggul	Kelurahan Unggul	Kelurahan Unggul

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul pada Tahun 2024 adalah sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2023 sebesar 100,00 % telah sama dan sesuai dengan target dicapai. Meskipun sudah mencapai target,



berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mempertahankan kondisi kegiatan yang menjadi parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang telah mencapai.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 2 Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah (akhir Renstra) tahun 2026 sebesar 100,00 % telah mencapai 100,00 %. Untuk mempertahankan capaian target kinerja tersebut maka harus lebih ditingkatkan kembali kinerja secara optimal serta diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Persentase Kelurahan Unggul tahun 2024 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	100,00	100,00	100,00
2	ANTAPANI	100,00	100,00	100,00
3	ARCAMANIK	100,00	100,00	100,00
4	ASTANAANYAR	100,00	100,00	100,00
5	BABAKAN CIPARAY	100,00	100,00	100,00
6	BATUNUNGGAL	75,00	75,00	100,00
7	BANDUNG KIDUL	100,00	100,00	100,00
8	BANDUNG KULON	100,00	100,00	100,00
9	BANDUNG WETAN	100,00	100,00	100,00
10	BUAH BATU	100,00	100,00	100,00
11	BOJONGLOA KALER	100,00	100,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	100,00	100,00	100,00
13	CIBEUNYING KALER	100,00	100,00	100,00
14	CIBEUNYING KIDUL	66,67	66,67	100,00
15	CIBIRU	100,00	100,00	100,00



NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
16	CICENDO	100,00	100,00	100,00
17	CIDADAP	100,00	100,00	100,00
18	CINAMBO	100,00	100,00	100,00
19	COBLONG	100,00	100,00	100,00
20	GEDE BAGE	100,00	100,00	100,00
21	KIARACONDONG	100,00	100,00	100,00
22	LENGKONG	100,00	100,00	100,00
23	RANCASARI	100,00	100,00	100,00
24	REGOL	85,71	85,71	100,00
25	MANDALAJATI	75,00	100,00	133,33
26	SUKASARI	100,00	100,00	100,00
27	SUKAJADI	60,00	60,00	100,00
28	SUMUR BANDUNG	100,00	100,00	100,00
29	UJUNG BERUNG	100,00	100,00	100,00
30	PANYILEUKAN	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 1 Kecamatan Kiaracondong yaitu Persentase Kelurahan Unggul pada tahun 2024 sebesar 100,00 % dari target 100,00 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00% tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Batununggal, Cibeunying Kidul, Regol, dan Sukajadi dengan capaian kinerjanya sebesar 100,00%, maka Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 2 yaitu terdiri atas program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk tahun 2024 mencapai 100,00 %.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100,00 %. Realisasi (*inputs*) 100,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% =$

$$\frac{100,00\%}{100,00\%} \times 100\% = 100,00\%.$$

Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:





NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	6 Kelurahan	6 Kelurahan	$= \frac{\text{Memenuhi kriteria}}{\text{Target Kel Unggul}} \times 100\%$ $= \frac{6 \text{ Kel}}{6 \text{ Kel}} \times 100\% = 100,00\%$
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase laporan RT/RW tepat waktu	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	$\frac{4 \text{ dok}}{4 \text{ dok}} \times 100\% = 100,00\%$
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100\% = 100,00\%$
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik terpelihara	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$



Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen	4 dokumen	$\frac{4 \text{ dok}}{4 \text{ dok}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.7.376.470.291,- atau 96,96 % dari pagu anggaran sebesar Rp.7.607.702.380,-.

Efisiensi dan efektifitas anggaran sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :



No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
A.	Sasaran 2						
1	Melebihi/ Melampaui Target	-	100,00	7.376.470.291	96,96	3,04	103,13
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Mencapai Target	-					

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sangat baik, dengan pencapain tingkat efisiensi sebesar 3,04 % dan tingkat efektifitas sebesar 103,13 %.

Faktor pendukung Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA dan DPPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat belum sesuai dengan Kerangka



Acuan Kerja (KAK) Kecamatan dan Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

2. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.

Solusi Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan :

Untuk meningkatkan sasaran 2 dengan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga yang terkait untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul agar 4 jenis kondisi kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPD dan janji Kepala Daerah.
2. Meningkatkan sumber daya yang ada, untuk lebih terfokus kepada 4 jenis kondisi kegiatan yang menjadi Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.



Sasaran 3

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Capaian Tahun 2026 (akhir Renstra)	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Kelurahan Berdaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Grafik 2.3

Capaian Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024





Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Persentase Kelurahan Berdaya**" adalah sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian kinerja ini sesuai target yang diperjanjikan. Meskipun telah sesuai dengan target yang dicapai, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra atau tahun pertama Renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Berdaya" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi/isu ke-4 Kota Bandung yaitu "*Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota*" adalah Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Berdaya.



2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Berdaya adalah Persentase Jumlah Kelurahan yang berdaya dibagi dengan jumlah semua Kelurahan di Kecamatan.

Kriteria Kelurahan Berdaya adalah Terdapat 10 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan. **Kelurahan Berdaya** adalah Kelurahan yang melaksanakan minimal 50 % dari kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan kegiatan pendukung ODF 100%;
2. Pengelolaan kegiatan penanganan stunting;
3. Kangpisman/pengelolaan sampah RW;
4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa;
5. Buruan Sae/Urban Farming;
6. RW bebas genangan;
7. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana permukiman lainnya;
8. Pembinaan Posyandu Aktif;
9. Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat;
10. Fasilitasi kegiatan LKK.

3. Kinerja nyata dengan Rencana :

Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Kelurahan Berdaya, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :

Pencapaian Realisasi Kriteria Kelurahan Berdaya Kecamatan Kiaracondong

Wilayah	Jumlah Kriteria Kelurahan Berdaya	Realisasi Kriteria Kelurahan Berdaya	Pencapaian
<i>Kelurahan</i>	<i>Kriteria</i>	<i>Kriteria</i>	<i>%</i>
Sukapura	6	6	100,00





Kebon Jayanti	6	6	100,00
Babakan Surabaya	7	7	100,00
Cicaheum	8	8	100,00
Babakansari	10	10	100,00
Kebon Kangkung	6	6	100,00
Jumlah	43	43	100,00

Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Kelurahan Berdaya, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :

Kriteria/Jenis Kegiatan Kelurahan Berdaya	Wilayah					
	Sukapura	Kebon Jayanti	Babakan Surabaya	Cicaheum	Babakan sari	Kebon Kangkung
Pengelolaan kegiatan pendukung ODF 100%	1	1	1	1	1	1
Pengelolaan kegiatan penangan stunting	1	1	1	1	1	1
Kangpisan/ pengelolaan sampah RW	1	1	1	1	1	
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa				1	1	
Buruan Sae/Urban Farming				1	1	
RW bebas genangan					1	



Pembangunan /Pemeliharaan Sarana Prasarana permukiman lainnya			1	1	1	1
Pembinaan Posyandu Aktif	1	1	1	1	1	1
Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat	1	1	1		1	1
Fasilitasi kegiatan LKK	1	1	1	1	1	1
Jumlah kriteria Kelurahan Berdaya	6 kriteria	6 kriteria	7 kriteria	8 kriteria	10 kriteria	6 kriteria
Capaian Kelurahan Berdaya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung Kelurahan Berdaya adalah sebagai berikut :

Jumlah Unit Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terealisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Jumlah
Sarana Prasarana	-	18	28	16	62
Pemberdayaan Masyarakat	9	17	25	25	76
Jumlah	9	35	53	41	138

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Berdaya tahun 2024 sebesar 100,00 % atau 100,00 % dari target 100,00% yang diperjanjikan. Persentase Kelurahan Berdaya sebesar 100,00 % , merupakan jumlah Kelurahan yang telah memenuhi kriteria



Kelurahan Berdaya dibagi dengan jumlah seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan x 100%.

Terdapat 10 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan Berdaya yang melaksanakan minimal 50 % dari kegiatan, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

- Kelurahan Sukapura = 6 kriteria
- Kelurahan Kebon Jayanti = 6 kriteria
- Kelurahan Babakan Surabaya = 7 kriteria
- Kelurahan Cicaheum = 8 kriteria
- Kelurahan Babakansari = 10 kriteria
- Kelurahan Kebon Kangkung = 6 kriteria

Seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Kiaracondong telah memenuhi kriteria sebagai Kelurahan Berdaya.

Pencapaian Jumlah kegiatan yang menunjang Kelurahan Berdaya lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terlaksana dengan rincian sebagai berikut :

- Kelurahan Sukapura = 11 kegiatan
- Kelurahan Kebon Jayanti = 7 kegiatan
- Kelurahan Babakan Surabaya = 0 kegiatan
- Kelurahan Cicaheum = 12 kegiatan
- Kelurahan Babakansari = 22 kegiatan
- Kelurahan Kebon Kangkung = 10 kegiatan

Pencapaian Jumlah kegiatan yang menunjang Kelurahan Berdaya lingkup Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terlaksana dengan rincian sebagai berikut :

- Kelurahan Sukapura = 14 kegiatan
- Kelurahan Kebon Jayanti = 15 kegiatan
- Kelurahan Babakan Surabaya = 18 kegiatan
- Kelurahan Cicaheum = 6 kegiatan
- Kelurahan Babakansari = 8 kegiatan
- Kelurahan Kebon Kangkung = 15 kegiatan



Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terbina mencapai 100 % terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2024, yang terdiri atas Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan sebanyak 4 lembaga kemasyarakatan terealisasi secara keseluruhan dan Jumlah laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebanyak 2 laporan telah tercapai secara keseluruhan. Untuk mencapai dan mempertahankan kinerja perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan melaksanakan pembinaan secara optimal serta kerja sama yang baik dengan lembaga kemasyarakatan dalam meningkatkan pemberdayaan kemasyarakatan terbina.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil Capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Persentase Kelurahan Berdaya tahun 2024 sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan tahun 2023 atau tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan, hal ini dikarenakan baru terlaksana di tahun 2024.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 3 Persentase Kelurahan Berdaya sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah (akhir Renstra) tahun 2026 sebesar 100,00 % telah mencapai 100,00 %. Untuk mempertahankan capaian target kinerja tersebut maka harus lebih ditingkatkan kembali kinerja secara optimal serta diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Persentase Kelurahan Berdaya tahun 2024 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut:





Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lainnya.

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE KELURAHAN BERDAYA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	66,67	100,00	149,99
2	ANTAPANI	25,00	25,00	100,00
3	ARCAMANIK	50,00	50,00	100,00
4	ASTANAANYAR	50,00	100,00	200,00
5	BABAKAN CIPARAY	83,13	85,17	102,45
6	BATUNUNGGAL	25,00	25,00	100,00
7	BANDUNG KIDUL	100,00	100,00	100,00
8	BANDUNG KULON	50,00	100,00	200,00
9	BANDUNG WETAN	66,67	100,00	149,99
10	BUAH BATU	25,00	100,00	400,00
11	BOJONGLOA KALER	40,00	40,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	100,00	100,00	100,00
13	CIBEUNYING KALER	100,00	100,00	100,00
14	CIBEUNYING KIDUL	33,33	33,33	100,00
15	CIBIRU	75,00	100,00	133,33
16	CICENDO	100,00	100,00	100,00
17	CIDADAP	66,67	66,67	100,00
18	CINAMBO	25,00	100,00	400,00
19	COBLONG	95,70	97,05	101,41
20	GEDE BAGE	50,00	50,00	100,00
21	KIARACONDONG	100,00	100,00	100,00
22	LENGKONG	75,00	75,00	100,00
23	RANCASARI	75,00	100,00	133,33
24	REGOL	100,00	100,00	100,00
25	MANDALAJATI	50,00	100,00	200,00
26	SUKASARI	100,00	100,00	100,00
27	SUKAJADI	100,00	100,00	100,00
28	SUMUR BANDUNG	50,00	50,00	100,00
29	UJUNG BERUNG	40,00	40,00	100,00
30	PANYILEUKAN	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 3 Kecamatan Kiaracondong Persentase Kelurahan Berdaya pada tahun 2024 sebesar 100,00 % dari target 100,00 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Antapani, Arcamanik, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, Cidadap, Gede Bage, Lengkong, Sumur Bandung, dan Ujung Berung, dengan capaian kerjanya sebesar 100,00 %, maka Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Kiaracondong lebih baik.



7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 3 yaitu terdiri atas program Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan pada tahun 2024 sebesar 100,00 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 yaitu Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100,00 %. Realisasi (*inputs*) 100,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam RKPDP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100,00 % sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Realisasi (*inputs*) 100,00 % sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Lapang Radar Jalan Babakansari III

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terbina	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	62 unit/kegiatan	62 unit/kegiatan	$\frac{62}{62} \times 100 \% = 100,00 \%$
			Kelurahan Sukapura = 11 unit/kegiatan	$\frac{11}{62} \times 100 \% = 17,74 \%$
			Kelurahan Kebon Jayanti = 7 unit/kegiatan	$\frac{7}{62} \times 100 \% = 11,30 \%$
			Kelurahan Cicaheum = 12 unit/kegiatan	$\frac{12}{62} \times 100 \% = 19,35 \%$
			Kelurahan Babakansari = 22 unit/kegiatan	$\frac{22}{62} \times 100 \% = 35,48 \%$
			Kelurahan Kebon Kangkung = 10 unit/kegiatan	$\frac{10}{62} \times 100 \% = 16,13 \%$
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 pokmas/ormas	18 pokmas/ormas	$\frac{18}{18} \times 100 \% = 100,00 \%$
			Kelurahan Sukapura = 3 pokmas/ormas	$\frac{3}{18} \times 100 \% = 16,67 \%$





			Kelurahan Kebon Jayanti = 3 pokmas/ ormas	$\frac{3}{18} \times 100\% = 16,67\%$
			Kelurahan Babakan Surabaya = 3 pokmas/ormas	$\frac{3}{18} \times 100\% = 16,67\%$
			Kelurahan Cicaheum = 3 pokmas/ormas	$\frac{3}{18} \times 100\% = 16,67\%$
			Kelurahan Babakansari = 3 pokmas/ormas	$\frac{3}{18} \times 100\% = 16,67\%$
			Kelurahan Kebon Kangkung = 3 pokmas/ormas	$\frac{3}{18} \times 100\% = 16,67\%$

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100 %. Realisasi (*inputs*) 100 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% =$

$\frac{100}{100} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tahun Anggaran 2024.

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terbina	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100,00\%$



Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	2 laporan	$\frac{2}{2} \times 100 \% = 100,00 \%$
---	---	-----------	-----------	---

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.5.876.554.613,- atau 93,11 % dari pagu anggaran sebesar Rp6.311.684.836,- .

Efisiensi dan efektifitas anggaran sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
A.	Sasaran 3						
1	Melebihi/ Melampaui Target	-	100,00	5.876.554.613	93,11	6,89	107,40
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Mencapai Target	-					

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan sangat baik, dengan pencapain tingkat efisiensi sebesar 6,89 % dan tingkat efektifitas sebesar 107,40 %.

Faktor pendukung Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong diantaranya :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA dan DPPA.



2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan diantaranya :

Dalam menyusun program kerja kegiatan lembaga kemasyarakatan masih terdapat dominasi Ketua RW dan RT dalam penyusunan rencana kerja kegiatan, tidak berdasarkan aspirasi masyarakat seutuhnya.

Solusi Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan diantaranya :

Untuk meningkatkan sasaran 3 dengan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Berdaya berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan, dalam penyusunan program kerja kegiatan berdasarkan hasil dari aspirasi masyarakat mulai dari rembuk warga sehingga besaran manfaatnya dapat diterima secara langsung oleh masyarakat secara utuh.
2. Melakukan perencanaan kegiatan secara tepat dan cermat serta menganalisa kegiatan yang bersifat dinamis, meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran.



Sasaran 4

Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Capaian Tahun 2026 (akhir Renstra)	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Grafik 2.4

Capaian Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan Tahun 2024





Sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator "**Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan**" adalah sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra atau tahun pertama Renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong maka capaian kerjanya mencapai 100 %. Untuk mencapai dan mempertahankan kinerja diantaranya meningkatkan kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang mendukung tercapainya indikator Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. **Penjelasan umum dan sasaran indikator**

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi/isu ke-4 Kota Bandung yaitu "*Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota*" adalah Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan.





2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan adalah persentase jumlah Satlinmas yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh satlinmas yang ada di Kecamatan dikali 100%.

Kriteria Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan adalah secara kumulatif memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas;
2. Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas;
3. Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas;
4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas;
5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas;
6. Laporan Tahunan Satlinmas;
7. Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria:
 - Kepengurusan/Kelembagaan
 - Jadwal piket/ronda
 - Daftar Hadir
 - Buku Laporan Kejadian

3. Kinerja nyata dengan Rencana

Hasil kinerja nyata indikator Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan Tahun 2024 adalah sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil pencapaian Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan, pada Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :





Wilayah	Kriteria	Jumlah Kriteria Satlinmas Aktif terpenuhi	%	Keterangan
Kelurahan Sukapura	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Kebon Jayanti	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Babakan Surabaya	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Cicaheum	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Babakansari	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Kebon Kangkung	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Jumlah	4	4	100,00	

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan tahun 2024 sebesar 100,00 % atau 6 Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Satlinmas Aktif lingkup Kecamatan dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

Untuk mencapai dan mempertahankan kinerja perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan melaksanakan pembinaan secara





optimal serta kerja sama yang baik dalam rangka meningkatkan persentase satlinmas aktif di lingkup Kecamatan Kiaracondong.

Berdasarkan hasil pencapaian Persentase Satkamling RW Aktif lingkup Kelurahan, pada Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut:

Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif	%	Keterangan
Kelurahan Sukapura	15	11	12,94	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Kelurahan Kebon Jayanti	14	11	12,94	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Kelurahan Babakan Surabaya	15	12	14,12	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Kelurahan Cicaheum	12	10	11,76	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Kelurahan Babakansari	18	18	21,18	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Kelurahan Kebon Kangkung	11	3	3,53	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Jumlah	85	65	76,47	



Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Satkamling RW Aktif Lingkup Kelurahan tahun 2024 sebesar 76,47 % atau 65 RW yang telah memenuhi kriteria satkamling RW aktif Kelurahan dari 85 RW yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

Untuk mencapai dan mempertahankan kinerja perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan melaksanakan pembinaan secara optimal serta kerja sama yang baik dengan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan persentase satkamling RW aktif di lingkup Kelurahan Kecamatan Kiaracondong.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil Capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan tahun 2024 sebesar 100,00% dan Persentase Satkamling RW aktif lingkup Kelurahan sebesar 76,47% bila dibandingkan dengan tahun 2023 atau tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan, hal ini dikarenakan baru terlaksana di tahun 2024.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator utama sasaran 4 Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan tahun 2024 telah memenuhi 4 kriteria dari target 4 kriteria dengan mencapai 100 % terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2024, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026 Kecamatan Kiaracondong sebanyak 4 kriteria, pencapaian Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan telah mencapai 100,00 %. Untuk mempertahankan capaian target kinerja tersebut maka harus lebih ditingkatkan kembali kinerja secara optimal serta diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Pencapaian Persentase Satkamling RW Aktif Lingkup Kelurahan Kecamatan Kiaracondong tahun 2024 mencapai 76,47 % atau 100,00 % terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026 Kecamatan





Kiaracondong sebesar 85,88 %, pencapaian Persentase Satkamling RW Aktif Lingkup Kelurahan baru mencapai 89,04 % terhadap target akhir Renstra tahun 2024 - 2026. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Perbandingan Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan Tahun 2024 dengan instansi lainnya :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE SATLINMAS AKTIF LINGKUP KECAMATAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	66,67	100,00	149,99
2	ANTAPANI	50,00	50,00	100,00
3	ARCAMANIK	75,00	75,83	101,11
4	ASTANAANYAR	66,67	100,00	149,99
5	BABAKAN CIPARAY	59,65	76,76	128,68
6	BATUNUNGGAL	50,00	50,00	100,00
7	BANDUNG KIDUL	75,00	75,00	100,00
8	BANDUNG KULON	75,00	76,63	102,17
9	BANDUNG WETAN	67,67	100,00	149,99
10	BUAH BATU	75,00	75,00	100,00
11	BOJONGLOA KALER	40,00	40,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	66,66	83,33	125,01
13	CIBEUNYING KALER	75,00	100,00	133,33
14	CIBEUNYING KIDUL	50,00	50,00	100,00
15	CIBIRU	75,00	100,00	133,33
16	CICENDO	66,67	100,00	149,99
17	CIDADAP	66,67	66,67	100,00
18	CINAMBO	50,00	100,00	200,00
19	COBLONG	70,00	82,00	117,14
20	GEDE BAGE	75,00	75,00	100,00
21	KIARACONDONG	100,00	100,00	100,00
22	LENGKONG	75,00	75,00	100,00
23	RANCASARI	80,00	82,60	103,36
24	REGOL	71,42	71,42	100,00
25	MANDALAJATI	50,00	60,00	120,00
26	SUKASARI	50,00	100,00	200,00
27	SUKAJADI	100,00	100,00	100,00
28	SUMUR BANDUNG	50,00	50,00	100,00
29	UJUNG BERUNG	100,00	100,00	100,00
30	PANYILEUKAN	75,00	100,00	133,33

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 4 Kecamatan Kiaracondong yaitu Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan pada tahun



2024 sebesar 100,00% dari target 100,00% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Antapani, Bandung Kidul, Batununggal, Bojongloa Kaler, Buahbatu, Cibeunying Kidul, Cidadap, Gedebage, Lengkong, Regol, dan Sumur Bandung dengan capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, maka Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 4 yaitu terdiri atas program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar 100 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 4 yaitu Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan dan Persentase Satkamling RW Aktif lingkup Kelurahan telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100,00 %. Realisasi (*inputs*) 100,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$. Dan Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 76,47 % realisasi (*inputs*) 76,47 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{76,47}{76,47} \times 100 \% = 100,00 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai adalah Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan/sub kegiatan dalam program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan



/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas Aktif lingkup Kecamatan	100,00 %	100,00 %	$= \frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100 \%$
	Persentase Satkamling RW Aktif lingkup Kelurahan	76,47 %	76,47 %	$= \frac{76,47}{76,47} \times 100\% = 100 \%$
Kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Satlinmas Kelurahan yang terbina Kecamatan	100,00 %	100,00 %	$= \frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100 \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan	76,47 %	76,47 %	$= \frac{76,47}{76,47} \times 100\% = 100 \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Sukapura	11 RW	85 RW	$= \frac{11 \text{ RW}}{85 \text{ RW}} \times 100\% = 12,94 \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Kebon Jayanti	11 RW	85 RW	$= \frac{11 \text{ RW}}{85 \text{ RW}} \times 100\% = 12,94 \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Babakan Surabaya	12 RW	85 RW	$= \frac{12 \text{ RW}}{85 \text{ RW}} \times 100\% = 14,12 \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Cicaheum	10 RW	85 RW	$= \frac{10 \text{ RW}}{85 \text{ RW}} \times 100\% = 11,76 \%$



	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Babakansari	18 RW	85 RW	$= \frac{18 \text{ RW}}{85 \text{ RW}} \times 100\% = 21,18 \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Kebon Kangkung	3 RW	85 RW	$= \frac{3 \text{ RW}}{85 \text{ RW}} \times 100\% = 3,53 \%$
Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	4 laporan	$= \frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100\% = 100 \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.2.338.263.095,00 atau 97,03 % dari pagu anggaran sebesar Rp.2.409.847.765,00.

Efisiensi dan efektifitas anggaran sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
A.	Sasaran 4		100,00	2.338.263.095	97,03	2,97	103,06





1	Melebihi/ Melampaui Target	-					
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Mencapai Target	-					

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan cukup baik, dengan pencapaian tingkat efisiensi sebesar 2,97 % dan tingkat efektifitas sebesar 103,06 %.

Faktor pendukung Sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan diantaranya sebagai berikut :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA dan DPPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPD sampai dengan PK dan PK Perubahan Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat Sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan.
2. Telah menurunnya budaya masyarakat terhadap kegiatan siskamling RW aktif khususnya didaerah perkotaan yang hanya mengandalkan tenaga keamanan komplek atau Satpam.

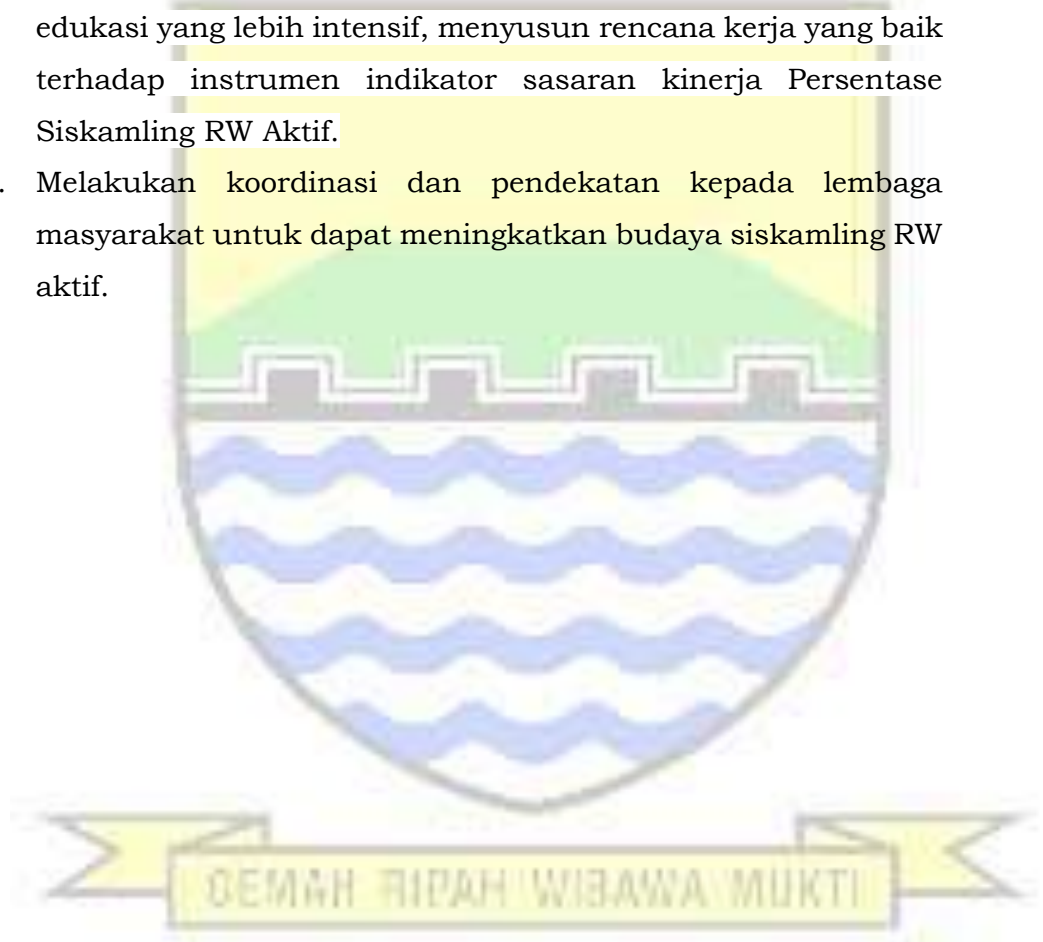
Solusi Sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan diantaranya sebagai berikut :

Untuk meningkatkan sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dengan capaian indikator kinerja



Persentase Satlinmas Aktif lingkup Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kembali tingkat kesadaran masyarakat terhadap peran pentingnya menjaga ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum di masing-masing wilayah dengan melakukan edukasi yang lebih intensif, menyusun rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Siskamling RW Aktif.
2. Melakukan koordinasi dan pendekatan kepada lembaga masyarakat untuk dapat meningkatkan budaya siskamling RW aktif.





2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KIARACONDONG

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kiaracondong, perlu ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pengembangan UMKM

Kecamatan Kiaracondong dengan mayoritas penduduk yang padat dapat menjadi peluang bagi dunia usaha mikro. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengembangan UMKM dapat menjadi pilihan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di kewilayahan. Untuk mengembangkan usaha mikro perlu difasilitasi sarana dan prasarana pemasarannya (market place), dalam hal ini pemerintah daerah atau kewilayahan dapat mengimplikasikan kebijakannya sesuai dengan regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota seperti pengadaan pameran, penyelenggaraan kuliner day/kuliner night, festival dan lain sebagainya.

2. Mengoptimalisasi pengelolaan sampah

Permasalahan sampah khususnya didaerah perkotaan merupakan masalah besar yang harus dihadapi, termasuk Kecamatan Kiaracondong yang memproduksi sampah 31,9 ton perhari diperlukan penanganan dan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Untuk mengoptimalisasi pengelolaan sampah di kewilayahan perlu ditetapkan kebijakan yang tepat seperti kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, pemanfaatan sampah agar dapat menjadi nilai tambah (value added) dan pengelolaan sampah yang tepat guna.

3. Meningkatkan ketahanan pangan

Di dalam suatu kewilayahan konteks ketahanan pangan dapat berupa ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat yang cukup dan terjangkau karena menurunkan risiko konflik sosial akibat kelangkaan atau kenaikan harga pangan. Kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya berkoordinasi dengan instansi terkait dengan pangan seperti Deperindag, Bulog, BUMN/BUMD dan





koperasi. Mengadakan pameran pasar murah dengan harga yang terjangkau dan kualitas pangan yang baik.

4. Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur kewilayahan

Pemeliharaan infrastruktur kewilayahan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya perbaikan jalan, drainase, fasilitas umum dan infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat di kewilayahan.

5. Pencegahan dan penurunan stunting

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran berdampak terhadap layanan kesehatan masyarakat belum dirasakan secara optimal, hal ini berpotensi meningkatnya angka stunting/gizi buruk bagi ibu hamil. Kebijakan yang dapat dilaksanakan diantaranya menyusun program khusus pendorong pencegahan stunting, memfasilitasi makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis, memfasilitasi bantuan bagi warga miskin dan meningkatkan taraf kehidupan warga miskin.

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kebijakan yang dilakukan diantaranya Mencakup kemudahan akses, kecepatan dan transparansi dalam pelayanan publik tingkat Kecamatan, seperti administrasi kependudukan dll.



2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui Satlinmas Aktif.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong tahun 2026, berfokus pada kinerja RPJMD 2025 – 2029 Kota Bandung dan Renstra Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 – 2029 pada program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026. Berdasarkan analisis kebutuhan, dapat dilihat dari hasil reviu terhadap RKPD seperti dalam tabel berikut dibawah ini :





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
Lapang Radar Jalan Babakansari III

Tabel 2.3

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik - Nilai Sakip Perangkat Daerah	90 % A	18.300.699.162	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik - Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 % 85,65	18.300.699.161,97	Terdapat perubahan indikator kinerja program dan target capaian Indikator Program
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0%	0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0%	0	
1.1	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	0	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	12.216.010.847	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12.216.010.846,65	Terdapat perubahan target capaian indikator kegiatan





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 orang/bulan	12.216.010.847	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	510 orang/bulan	12.216.010.846,65	Terdapat perubahan target capaian indikator sub kegiatan
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 laporan	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 laporan	0	
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	0	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	1.446.387.699	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.446.387.698,50	Terdapat perubahan target capaian indikator kegiatan
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 paket	0	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 paket	0	





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	373.539.863	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	373.539.862,87	
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	0 paket	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	0 paket	0	
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	999.143.836	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	999.143.835,63	
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 paket	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 paket	0	
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	37.604.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	37.604.000,00	





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	36.100.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	36.100.000,00	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	0	
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0	
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	3.524.580.140	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.524.580.140,00	Terdapat perubahan target capaian





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	330.720.600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	330.720.600,00	
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	3.193.859.540	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	3.193.859.540,00	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	1.113.720.477	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.113.720.476,82	Terdapat perubahan target capaian indikator kegiatan
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	59 unit	605.967.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	59 unit	605.967.000,00	
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	135 unit	94.498.600	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	135 unit	94.498.600,00	





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	413.254.877	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	413.254.876,82	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Kelurahan Unggul	100,00 %	8.558.640.716	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Kelurahan Unggul	50,00 %	8.558.640.716,32	Terdapat perubahan target capaian karena perbedaan kriteria parameter indikator kinerja
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase RT/RW yang laporannya lengkap	100%	4.521.838.360	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Kelurahan yang memenuhi data profil Kelurahan di bidang Pemerintahan	50%	4.521.838.360,00	Terdapat perubahan Indikator Kinerja Kegiatan
								- Persentase pemenuhan data profil Kelurahan di bidang Pemerintahan	100%		
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	4 dokumen	4.521.838.360	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	4 dokumen	4.521.838.360,00	





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	100%	170.517.834	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan tepat waktu sesuai SOP	100%	170.517.833,50	Terdapat perubahan Indikator Kinerja Kegiatan
2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	4 laporan	170.517.834	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	4 laporan	170.517.833,50	
3	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik terpelihara	100%	2.735.505.531	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Kelurahan yang memenuhi data profil Kelurahan di bidang Ekonomi Pembangunan	50%	2.735.505.530,82	Terdapat perubahan Indikator Kinerja Kegiatan
								- Persentase pemenuhan data profil Kelurahan di bidang Ekonomi Pembangunan	100%		
3.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	- 4 dokumen	2.735.505.531	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	- 4 dokumen	2.735.505.530,82	





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat di Bidang Kesejahteraan Sosial	- 4 laporan	1.130.778.992	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Kelurahan yang memenuhi data profil Kelurahan di bidang Kesejahteraan Sosial	50%	1.130.778.992,00	Terdapat perubahan Indikator Kinerja kegiatan dan target capaian
			-	-				- Persentase pemenuhan data profil Kelurahan di bidang Kesejahteraan Sosial	100%		
4.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	- 4 laporan	1.130.778.992	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	- 4 laporan	1.130.778.992,00	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Kelurahan Berdaya	100 %	12.325.667.305	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Kelurahan Berdaya	50,00 %	12.325.667.304,65	Terdapat perubahan Target Capaian karena perbedaan kriteria indikator kinerja
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terbina	100 %	12.031.427.605	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah kegiatan yang menunjang Kelurahan Berdaya	66 kegiatan	12.031.427.604,65	Terdapat perubahan Indikator Kinerja kegiatan dan target capaian





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan kegiatan Musrenbang di Kecamatan/ Kelurahan	1 laporan	137.788.400	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	4 lembaga kemasyarakatan	137.788.400,00	Terdapat perubahan Indikator Kinerja sub kegiatan dan target capaian
1.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan terbangun	27 unit/kegiatan	8.714.640.678	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan terbangun	26 unit	8.714.640.677,96	
1.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 pokmas/ormas	3.178.998.527	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	18 pokmas/ormas	3.178.998.526,69	
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terbina	100 %	294.29.700	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terbina	100 %	294.239.700,00	
2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	234.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	234.000.000,00	





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	60.239.700	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	60.239.700,00	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan - Persentase Satkamling RW Aktif lingkup Kelurahan	- 100 % - 85,88 %	2.354.423.326	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan - Persentase Satkamling Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan	- 100 % - 62,35 %	2.354.423.325,83	Terdapat perubahan Indikator Kinerja Program dan target capaian
1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Satlinmas Kelurahan yang terbina - Persentase Satkamling RW yang terbina	- 100 % - 85,88 %	2.354.423.326	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan yang terbina - Persentase Satkamling Aktif Kelurahan yang terbina	- 100 % - 100 %	2.354.423.325,83	Terdapat perubahan Indikator Kinerja Kegiatan
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	2.354.423.326	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	2.354.423.325,83	





2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN MASYARAKAT

Kebijakan belanja daerah Kota Bandung merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung khususnya di kewilayahan. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi maka arah kebijakan belanja berdasarkan pada prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2026.

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2026 disusun dengan pendekatan yang berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas pengguna anggaran ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan. Kebijakan belanja tahun 2026 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja terbagi atas kebijakan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kebijakan belanja langsung meliputi sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat.
2. Penganggaran belanja langsung untuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.





4. Belanja untuk mengakomodir usulan musrenbang dan reses yang disampaikan melalui *musrenbang* tingkat Kecamatan.
5. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan fokus pada belanja modal berupa bangunan, jalan, jembatan, dan aset untuk menjamin APBD diarahkan untuk menambahkan nilai aset milik pemerintah kota.
6. Mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya.
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi tiru dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
9. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program/kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan.
10. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan output yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien.

Kebijakan belanja tidak langsung meliputi sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Tabel 2.4

Usulan Program Prioritas Musrenbang Tahun 2025 untuk RKPD Tahun 2026
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

No	Sub Kegiatan	Lokasi	SKPD	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	KECAMATAN BATUNUNGGAL - KIARACONDONG DAN LENGKONG , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 3 Paket sebanyak 60 Orang. Biaya. Rp. 289.932.825	PELATIHAN BARISTA DASAR
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	KELURAHAN BABAKAN SARI KECAMATAN KIARACONDONG , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 95.333.235	PELATIHAN TATA RIAS PENGANTIN
3	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	KELURAHAN SUKAPURA - KECAMATAN KIARACONDONG, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 82.381.525	PELATIHAN DIGITAL MARKETING
4	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	KELURAHAN KEBONJAYANTI KECAMATAN KIARACONDONG , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 96.390.835	PELATIHAN CATERING
5	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	KELURAHAN KEBONKANGKUNG KECAMATAN KIARACONDONG , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 88.620.835	PELATIHAN PASTRY
6	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	KELURAHAN SUKAPURA - KECAMATAN KIARACONDONG , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 86.485.425	PELATIHAN MENJAHIT DASAR





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Sub Kegiatan	Lokasi	SKPD	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Gg. Keramat RW 01,02,03,04 kel. ciceheum, kec. kiaracandong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 82.381.525	PELATIHAN DIGITAL MARKETING
8	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kec. K iaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 96.644.275	PELATIHAN BARISTA DASAR
9	Perluasan Kesempatan Kerja	RW.10 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracandong , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 50 Orang. Biaya. Rp. 199.559.450	PADAT KARYA
10	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	RW.10 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracandong , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 82.381.525	PELATIHAN DIGITAL MARKETING
11	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	RT.05 / RW.10 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracandong , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 71.970.835	PELATIHAN TATA RIAS WAJAH
12	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	SUKAPURA - KIARACONDONG , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 3 Paket sebanyak 60 Orang. Biaya. Rp. 289.932.825	PELATIHAN BARISTA DASAR
13	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracandong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 77.743.750	PELATIHAN BARBER
14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kec. Kiaracandong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 88.620.835	PELATIHAN PASTRY
15	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kelurahan Babakan Surabaya. Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 96.644.275	PELATIHAN BARISTA DASAR





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Sub Kegiatan	Lokasi	SKPD	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 96.390.835	PELATIHAN CATERING
17	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	RW 12 Babakan Sari, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 96.390.835	PELATIHAN CATERING
18	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	RW 06 Sukapura , Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 96.390.835	PELATIHAN CATERING
19	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	RW 08 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 95.333.235	PELATIHAN TATA RIAS PENGANTIN
20	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	RW 08 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 77.743.750	PELATIHAN BARBER
21	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 92.035.425	PELATIHAN MEMBATIK
22	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	RW 07 Kel Sukapura kecamatan Kiaracondong , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 88.620.835	PELATIHAN PASTRY
23	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	RW 07 Kel Sukapura kecamatan Kiaracondong , Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 96.644.275	PELATIHAN BARISTA DASAR
24	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kecamatan Kiaracondong , Kota Bandung	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Volume: 1 Paket	Workshop Kewirausahaan





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
Lapang Radar Jalan Babakansari III

No	Sub Kegiatan	Lokasi	SKPD	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Biaya. Rp. 66.600.000	
25	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	RW 05 Sukapura, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 88.620.835	PELATIHAN PASTRY
26	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	RW 12 Babakan Sari, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 71.970.835	PELATIHAN TATA RIAS WAJAH
27	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kel Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 82.381.525	PELATIHAN DIGITAL MARKETING
28	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Sukapura RW 10, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 82.381.525	PELATIHAN DIGITAL MARKETING
29	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kebon Jayanti RW 04, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung	Dinas Ketenagakerjaan	Volume: 1 Paket sebanyak 20 Orang. Biaya. Rp. 96.390.835	PELATIHAN CATERING





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 berdasarkan acuan kinerja yang terdapat dokumen RPJMN Tahun 2025 – 2029, RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 – 2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

3.1.1 Isu Pembangunan Nasional

Pelaksanaan pembangunan Kota Bandung tidak lepas dari kebijakan pembangunan nasional, demikian juga dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misi RPJMN merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).





2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.2 Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025 - 2029

Pembangunan jangka menengah Kota Bandung merupakan bagian dari pembangunan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung, memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 yaitu:

1. Green dan blue economy
2. Kualitas dan daya saing SDM
3. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar
4. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan





5. Keberlanjutan penataan ruang
6. Kualitas tata kelola pemerintahan

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 adalah:

JABAR ISTIMEWA

Situasi Kondisi Terunggul, Termaju, Paripurna, dan Teratas

Dalam mencapai visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

3.1.3 Telaahan KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

Perumusan Isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Bandung diawali dengan identifikasi isu PB berdasarkan beberapa sumber diantaranya:

- a. Isu berdasarkan capaian TPB yang ditentukan oleh TPB dengan gap capaian dan persentase ketersediaan data tertinggi;
- b. Isu berdasarkan kondisi muatan lingkungan hidup Kota Bandung;
- c. Isu berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bandung;
- d. Isu berdasarkan dokumen perencanaan Kota Bandung lainnya;
- e. Isu strategis Provinsi Jawa Barat berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045;
- f. Isu strategis nasional berdasarkan dokumen KLHS RPJPN, serta
- g. Masukan pada agenda FGD 1

Dari ketujuh sumber tersebut didapatkan isu longlist yang kemudian disintesis menjadi 8 isu PB Strategis di Kota Bandung, yaitu :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali.





2. Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang memadai.
3. Kurang optimalnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dari hulu ke hilir.
4. Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.
5. Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata.
6. Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
7. Belum optimalnya pembangunan sektor dan sumber daya ekonomi yang inklusif.
8. Belum optimalnya penegakan hukum, implementasi good governance, dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Delapan isu PB strategis kemudian dilihat keterkaitannya dengan isu strategis pada dokumen Rankhir RPJPD Kota Bandung 2025-2045, Rantek RPJMD Kota Bandung 2025-2029, TPB, dan antar isu strategis. Selain itu diketahui juga antar isu strategis KLHS RPJMD Kota Bandung 2025-2029 memiliki pengaruh timbal balik. Hubungan timbal balik menunjukkan bahwa suatu isu dapat saling memengaruhi satu sama lain.

3.1.4 Isu Strategis RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 - 2029

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Bandung pada periode tahun 2025-2029 memerhatikan berbagai aspek baik internal maupun eksternal daerah. Berdasarkan telaahan pada potensi dan permasalahan kota, KLHS RPJMD, dan lingkungan dinamis baik global, nasional, regional dan kota, maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Bonus Demografi, Peningkatan Populasi Lansia, dan Transisi Demografi
2. Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi





3. Pengembangan Transportasi Publik, Dominasi Kendaraan Pribadi, dan Orientasi Transit
4. Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan
5. Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia
6. Ekspansi Ekspor, Dominasi Nasional, dan Posisi Kota Kreatif Global
7. Integrasi Smart City dan Dominasi *Artificial Intelligence & Internet of Things*
8. Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
9. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Peningkatan Wisatawan
10. Pelestarian Budaya

3.1.5 Isu Strategis Kecamatan Kiaracondong

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Bertolak dari penelaahan terhadap isu tata ruang wilayah Kota Bandung serta permasalahan pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan isu strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Isu-isu Strategis Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 - 2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu strategis Kota	Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional		
Sumber pendanaan dari APBD Kota Bandung yang menjadi kewenangan perangkat daerah dapat dioptimalisasikan	Belum optimal kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penegakan hukum, implementasi good governance, dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Kualitas tata kelola pemerintahan	Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Memanfaatkan dan mengoptimalkan TPS yang ada di kewilayahan	Belum optimalnya penanganan sampah	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali	Perkembangan demografi global	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan	Mengoptimalkan Pengelolaan Sampah
Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan	Belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur dasar	Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.	Peningkatan urbanisasi dunia	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan	Mengoptimalkan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu strategis Kota	Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional		
Dukungan lembaga masyarakat dan institusi kesehatan untuk mencegah dan mengurangi risiko gizi buruk	Belum optimalisasi penanganan kesejahteraan sosial kewilayahan	Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Konstelasi perdagangan global	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Keberlanjutan penataan ruang	Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia	Optimalisasi Pencegahan dan Penurunan Stunting
Kerja sama dengan koperasi yang telah berbadan hukum dan memfasilitasi kegiatan UMKM dengan diadakan acara kuliner day	Belum terfasilitasinya secara optimal UMKM yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat	Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang memadai.	Geopolitik dan geoekonomi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kualitas dan daya saing SDM	Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi	Memfasilitasi Pengembangan UMKM



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah tahap awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025 – 2045. RPJPD Kota Tahun 2025 – 2045 menekankan pada transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola serta landasan transformasi. Fokus agenda pembangunan tahun 2025 – 2029 adalah Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Fondasi Pembangunan Kota, yang kemudian diformulasikan dengan visi dan misi Wali Kota Bandung, tercermin dalam misi 2 yaitu Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan. Misi 2 menitik beratkan pada peningkatan kapasitas Kelurahan sebagai simpul keadilan sosial. Hal ini tercermin dari indikator yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Misi		Tujuan & Sasaran		Indikator	
2	Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	2.1	Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan	1	Indeks Daya Saing Daerah
				2	Gini Ratio
		2.1.1	Meningkatnya Pembangunan inklusif	1	Tingkat Kemiskinan
				2	Tingkat Pengangguran Terbuka

Indeks Daya Saing Daerah adalah instrument strategis untuk mengukur daya saing di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Indeks Daya Saing Daerah 2024 yang diluncurkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencakup 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota dengan 12 pilar daya saing seperti :

- **Infrastruktur** : menilai kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.



- Stabilitas Ekonomi Makro : mengukur stabilitas ekonomi makro yang mempengaruhi daya saing daerah.
- Keterampilan Tenaga Kerja : menilai kualitas dan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.
- Sistem Keuangan : mengukur efektivitas keuangan dalam mendukung kegiatan ekonomi.
- Kapabilitas Inovasi : menilai kemampuan daerah dalam mengembangkan inovasi dan teknologi.

Tujuan Indeks Daya Saing Daerah adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis bukti, serta meningkatkan daya saing daerah. Dengan adanya Indeks Daya Saing Daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menentukan strategi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan merupakan sasaran daerah pada RPJMD yang diampu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Melalui kewenangan dan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berkontribusi pada ketercapaian RPJMD Misi 2 Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan , dengan Tujuan 2.1 Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan (Indikator : Indeks Daya Saing Daerah) yaitu dalam meningkatkan kapasitas Kelurahan sebagai simpul keadilan sosial, sub sasaran strategis Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah (Indikator : Indeks Inovasi Daerah) dan Meningkatnya Ketentraman Daerah (indikator : Indeks Ketentraman). Selanjutnya, sub sasaran strategis ini menjadi tujuan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.





Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing isu strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebagai berikut :





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah dan Meningkatkan Ketentraman Daerah	Indeks Inovasi Daerah										
	Permenpan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,75	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	
	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan				Persentase Kelurahan UTAMA Kecamatan Kiaracondong	%	N/A	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

NO.	NSPK	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat		Indeks Ketenteraman										
	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan Kiaracondong	%	100	100	100	100	100	100	





3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Proses penyusunan program dan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top-down, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademis yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan tahun 2026.
2. Pendekatan partisipatif dan bottom-up dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui *e-musrenbang*, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;
 - c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Bandung;
 - e. Pelibatan secara aktif warga dalam forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi *e-musrenbang* pada forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD tahun 2026 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2026, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap





tujuan global, seperti SDG's (*Sustainable Development Goals*) dan pemenuhan SPM (*Standar Pelayanan Minimal*).

4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui :
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah.
 - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

Adapun Program dan kegiatan yang telah dirumuskan untuk tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel 3.1 di bawah ini Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
I	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan





No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>

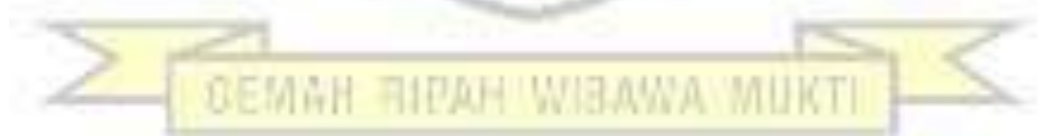




No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				<i>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musrenbang di Kelurahan
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				<i>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>



No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
IV	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan KUA/PPAS.

Indikator Kinerja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2026

a. Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka Camat Kiaracondong menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Kecamatan Kiaracondong, sebagaimana tabel berikut:





Tabel 4.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik Kecamatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	86,00
		- Persentase Kelurahan UTAMA Kecamatan Kiaracondong	%	50,00
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	- Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan Kiaracondong	%	100

b. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Ringkasan anggaran perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2026.

Secara rinci rumusan rincian proyeksi belanja perangkat daerah dan program prioritas perangkat daerah dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong beserta ringkasan anggarannya dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :

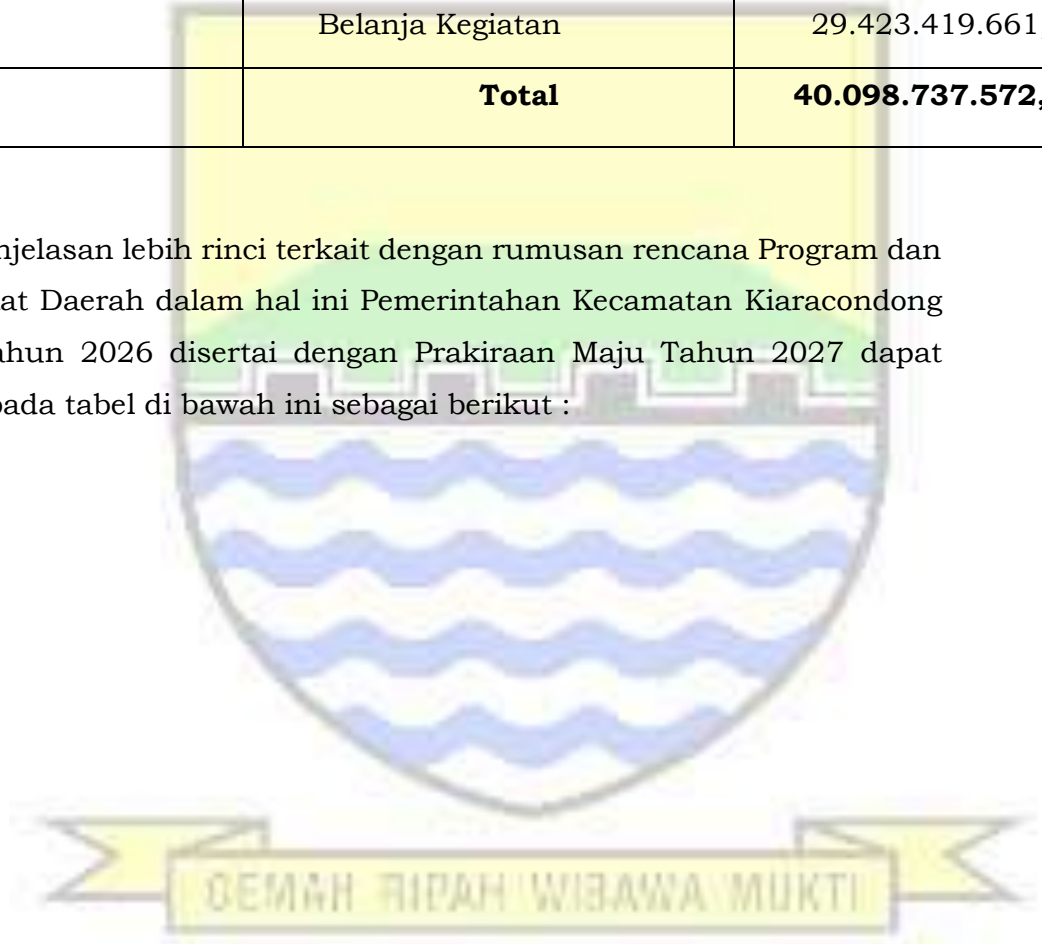




Rincian Proyeksi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2026

No	SKPD	Rincian	Rincian Belanja 2026
1	Kecamatan Kiaracondong	Belanja Operasi	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.675.317.911,00
		Belanja Kegiatan	29.423.419.661,87
		Total	40.098.737.572,87

Penjelasan lebih rinci terkait dengan rumusan rencana Program dan Perangkat Daerah dalam hal ini Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong pada Tahun 2026 disertai dengan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

Total Pagu : 40.098.737.572,87

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 % - 85,65 Nilai	17.721.550.433,51	Pendapatan Asli Daerah		- 100 % - 85,65 Nilai	18.608.908.008,87
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 0 %	0	Pendapatan Asli Daerah		- 100 %	70.047.241,89
7 01 01 2.01 0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 0 laporan	0	Pendapatan Asli Daerah		- 1 laporan	70.047.241,89
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	10.675.317.911,00	Pendapatan Asli Daerah		- 100 %	12.077.936.447,52





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Kiaracondong	- 510 orang/bulan	10.675.317.911,00	Pendapatan Asli Daerah		- 600 orang/bulan	12.077.936.447,52
7 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 0 laporan	0	Pendapatan Asli Daerah		- 1 laporan	115.361.692,36
7 01 01 2.05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Kiaracondong	- 0 paket	0	Pendapatan Asli Daerah		- 1 paket	115.361.692,36
7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	1.704.952.990,10	Pendapatan Asli Daerah		- 100 %	1.468.115.471,33
7 01 01 2.06 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 paket	0	Pendapatan Asli Daerah		- 1 paket	34.116.620,23
7 01 01 2.06 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 2 paket	479.181.154,47	Pendapatan Asli Daerah		- 2 paket	420.312.225,79
7 01 01 2.06 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan & Kelurahan Se-	- 0 paket	0	Pendapatan Asli Daerah		- 1 paket	42.493.750,38





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
			Kecamatan Kiaracondong										
7	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 paket	1.124.599.835,63	Pendapatan Asli Daerah		- 4 paket	854.930.570,87
7	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 paket	0	Pendapatan Asli Daerah		- 4 paket	41.577.552,14
7	01	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 dokumen	37.604.000,00	Pendapatan Asli Daerah		- 4 dokumen	38.480.615,05
7	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Kiaracondong	- 1 laporan	63.568.000,00	Pendapatan Asli Daerah		- 1 laporan	36.204.136,87
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 %	0	Pendapatan Asli Daerah		- 100 %	127.991.878,97
7	01	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 unit	0	Pendapatan Asli Daerah		- 2 unit	62.951.597,46





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.07 0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kecamatan Kiaracondong	- 0 unit	0	Pendapatan Asli Daerah		- 1 unit	65.040.281,51
7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	4.131.533.900,00	Pendapatan Asli Daerah		- 100 %	3.510.160.259,63
7 01 01 2.08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 laporan	318.660.600,00	Pendapatan Asli Daerah		- 12 laporan	343.011.322,49
7 01 01 2.08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 laporan	3.812.873.300,00	Pendapatan Asli Daerah		- 12 laporan	3.167.148.937,14
7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	1.209.745.632,41	Pendapatan Asli Daerah		- 100 %	1.239.295.017,17
7 01 01 2.09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 50 unit	596.124.000,00	Pendapatan Asli Daerah		- 59 unit	691.910.310,35





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	Operasional atau Lapangan												
7	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 135 unit	101.458.600,00	Pendapatan Asli Daerah		- 135 unit	111.649.191,25
7	01	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 unit	512.163.032,41	Pendapatan Asli Daerah		- 5 unit	435.735.515,57
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase Kelurahan Unggul	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 50 %	9.529.416.255,35	Pendapatan Asli Daerah		- 66,67 %	8.701.890.132,70
7	01	02	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Persentase Kelurahan yang memenuhi data profil Kelurahan di bidang Pemerintahan	Kecamatan Kiaracondong	- 50 %	4.521.838.360,00	Pendapatan Asli Daerah		- 66,67 %	4.718.890.518,19
					- Persentase pemenuhan data profil Kelurahan di bidang Pemerintahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %				- 100 %		
7	01	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 dokumen	4.521.838.360,00	Pendapatan Asli Daerah		- 4 dokumen	4.718.890.518,19





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	- Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan tepat waktu sesuai SOP	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	166.823.833,50	Pendapatan Asli Daerah		- 100 %	127.331.511,89
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	166.823.833,50	Pendapatan Asli Daerah		- 4 laporan	127.331.511,89
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	- Persentase Kelurahan yang memenuhi data profil Kelurahan di bidang Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Kiaracondong	- 50 %	2.350.984.719,85	Pendapatan Asli Daerah		- 66,67 %	2.804.079.615,01
		- Persentase pemenuhan data profil Kelurahan di bidang Ekonomi Pembangunan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %				- 100 %	
7.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	- Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	4 dokumen	2.350.984.719,85	Pendapatan Asli Daerah		4 dokumen	2.804.079.615,01





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Persentase Kelurahan yang memenuhi data profil Kelurahan di bidang Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Kiaracondong	- 50 %	2.489.769.342,00	Pendapatan Asli Daerah		- 66,67 %	1.051.588.487,61
						- Persentase pemenuhan data profil Kelurahan di bidang Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %					
7	01	02	2.04	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	2.489.769.342,00	Pendapatan Asli Daerah		- 4 laporan	1.051.588.487,61
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Persentase Kelurahan Berdaya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 50 %	10.973.957.624,86	Pendapatan Asli Daerah		- 66,67 %	12.710.185.893,94
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah kegiatan yang menunjang Kelurahan Berdaya	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 57 kegiatan	10.679.717.924,86	Pendapatan Asli Daerah		- 72 kegiatan	12.399.649.832,79
7	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musrenbang di Kelurahan	- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 lembaga kemasyarakatan	137.669.600,00	Pendapatan Asli Daerah		- 4 lembaga kemasyarakatan	149.053.442,22





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
 Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 03 2.02 0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan terbangun	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 57 unit	8.808.782.701,76	Pendapatan Asli Daerah		- 36 unit	8.986.406.085,43
7 01 03 2.02 0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 18 pokmas/ ormas	1.733.265.623,10	Pendapatan Asli Daerah		- 18 pokmas/ ormas	3.264.190.305,14
7 01 03 2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terbina	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	294.239.700,00	Pendapatan Asli Daerah		- 100 %	310.536.061,15
7 01 03 2.03 0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kecamatan Kiaracondong	- 4 lembaga kemasyarakatan	234.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		- 4 lembaga kemasyarakatan	247.587.900,42
7 01 03 2.03 0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 2 laporan	60.239.700,00	Pendapatan Asli Daerah		- 2 laporan	62.948.160,73
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan - Persentase Satkamling Aktif Kelurahan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 % - 62,35 %	1.873.813.259,15	Pendapatan Asli Daerah		- 100 % - 71,76 %	2.261.223.472,53





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG
Lapang Radar Jalan Babakansari III

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
7	01	04	2.02		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan yang terbina - Persentase Satkamling Aktif Kelurahan yang terbina	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 % - 100 %	1.873.813.259,15	Pendapatan Asli Daerah		- 100 % - 100 %	2.261.223.472,53
7	01	04	2.02	0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	- Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	1.873.813.259,15	Pendapatan Asli Daerah		- 4 laporan	2.261.223.472,53





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2026 yang tidak hanya memuat program dan kegiatan dalam pelayanan publik tetapi memuat rancangan kebijakan keuangan Perangkat Daerah, prioritas dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah, serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 – 2029, yang diselaraskan dengan agenda Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD tahun 2025 – 2045 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.

Penyusunan Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi, dimulai dari pelaksanaan Musrenbang pada level Rukun Warga, Musrenbang tingkat kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota serta mengakomodir usulan melalui mekanisme reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 - 2029 yang harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja untuk Tahun 2026, dan penyusunan KUA/PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2026.





Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2026 telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganaggaran sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Proses yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan RKPD Tahun 2026 digunakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (SIPD-RI).
2. Proses asistensi *offline* maupun *online* terhadap kesesuaian Program/Kegiatan dan belanja Perangkat Daerah yang dilakukan secara intensif di Bappelitbang yang bertujuan agar program prioritas yang telah disusun beserta indikator kinerja dan target dapat tercapai secara optimal.
3. Upaya menjaga keselarasan antara RKPD dengan RPJMD pada Tahun pertama dilakukan dengan secara konsisten menjadikan Peraturan Kepala Daerah tentang RPJMD sebagai pedoman, dimana sasaran daerah dalam RKPD diimplementasikan dalam program tahunan Perangkat Daerah.
4. Penyelenggaraan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati prioritas pembangunan Tahun 2026 didukung dengan pemanfaatan aplikasi *e-Musrenbang* dan *Laci RW* yang memberikan kesempatan secara luas kepada Rukun Warga (RW) melalui proses rembug warga untuk menyampaikan usulan dan dapat secara online mengetsahui status usulan yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan RKPD 2026 diperlukan kaidah yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kecamatan Kiaracondong secara terarah, efektif dan efisien. Kaidah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan RKPD adalah:

1. Seluruh perangkat daerah yang ada di Kecamatan Kiaracondong berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2026 secara sinergis dan terintegrasi.





2. Program/kegiatan beserta alokasi anggaran yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja tahun 2026 selaras dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan menjadi dasar bagi perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah yang pencapaiannya diukur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bapperida.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2026 bila diperlukan.

Program-program dan indikasi yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah ini tidak hanya menjabarkan rencana yang diakomodasi secara swakelola baik yang di danai dari DPA Kecamatan maupun Dinas Instansi terkait tingkat Kota, juga menjabarkan Prioritas Program dan pada tahun 2026 yang tidak dapat di akomodasikan dengan DPA Kecamatan.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kami susun ini dapat terlaksana dan diwujudkan sesuai dengan harapan seluruh warga masyarakat dan dapat kiranya memberikan gambaran tentang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 di wilayah Kecamatan Kiaracondong.

Bandung, 24 November 2025



Mochamad Arief Budiman, S.STP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197712171996121001